

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Keberadaan desa wisata di Desa Tasikharjo merupakan hasil pemberdayaan masyarakat yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh desa, termasuk karang taruna, Pokdarwis, dan pemerintah desa. Mereka berhasil mengembangkan potensi wisata desa dengan mengubahnya dari kondisi sederhana menjadi destinasi wisata yang tertata dengan baik. Kepemilikan pantai menjadi sasaran objek dalam pengembangan wisata Desa Tasikharjo yang melibatkan seluruh komponen masyarakat melalui program pemberdayaan.

Bentuk pelaksanaan pemberdayaan dilakukan melalui tiga tahapan utama: pertama, *Enabling* yakni dengan penyadaran potensi wisata melalui pelatihan dan penyediaan fasilitas awal; kedua, *Empowerment* dengan sosialisasi wisata yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, pengelola wisata, dan Dinas Pariwisata; ketiga, *Protecting* yakni perlindungan terhadap aset kepemilikan yang dilakukan dengan monitoring dan mencatat aset berupa sarana prasarana yang dimiliki dan membuat regulasi lokal yang membatasi masyarakat luar desa untuk terlibat dalam aktivitas wisata dan menambah keterlibatan masyarakat lokal untuk ikut berpartisipasi dalam aktivitas pariwisata.

Bentuk pemberdayaan yang telah dilaksanakan melalui pengembangan potensi desa wisata juga belum memiliki dampak terhadap kemandirian masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana desa wisata yang disebabkan karena masih menggantungkan pendanaan dari pihak luar yakni pemerintah daerah dan pihak swasta. Sehingga masyarakat semata mata hanya menjalankan apa yang sudah ada dan tidak dapat melakukan pengembangan secara mandiri.

Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan dalam pengembangan potensi wisata di Desa Tasikharjo. Faktor pendukung dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat di Desa Tasikharjo yakni support dari pemerintah desa, partisipasi aktif masyarakat, dan potensi yang dimiliki. Peran pemerintah desa yang mendorong terjadinya partisipasi yang melibatkan masyarakat menjadi pintu utama untuk mengembangkan desa wisata. Langkah yang diambil pemerintah desa yakni dengan mengirim proposal kepada pemerintah kabupaten untuk memberikan program pelatihan dan sosialisasi yang memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat terutama dalam hal pelayanan manajemen, dan kemandirian masyarakat.

Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor pendukung selanjutnya dari adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Keikutsertaan dan antusiasme dalam mengikuti program pelatihan dan sosialisasi memberikan masyarakat pemahaman akan pentingnya pengembangan wisata yang dimiliki desa untuk dijadikan sebagai desa wisata yang lebih baik, seperti pembangunan akses jalan menuju desa serta pembangunan infrastruktur seperti mushola, toilet dan lahan

parkir dibangun dengan cara bergotong royong. Potensi yang dimiliki Desa Tasikharjo menjadi faktor pendukung selanjutnya. Kepemilikan pantai di Desa Tasikharjo menjadi potensi wisata yang menjanjikan. Keberadaan pasir putih yang berada di bibir pantai ditambah dengan ribuan pohon cemara menjadi daya tarik untuk dijadikan spot foto wisatawan. Dukungan dari fasilitas dan pelayanan yang memadai semakin memperkuat potensi wisata Desa Tasikharjo sebagai destinasi unggulan di Kabupaten Rembang.

Faktor penghambat dilakukannya pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata oleh pemerintah desa bersama pemerintah daerah yakni keterbatasan sumber daya berupa sulitnya mendapatkan pendanaan dari pemerintah daerah karena terkendala pandemi Covid-19. Tantangan infrastruktur menjadi faktor penghambat lainnya dalam pengembangan di lokasi wisata, karena lahan yang akan dijadikan pengembangan infrastruktur merupakan milik masyarakat yang artinya membutuhkan biaya untuk membeli lahan tersebut. Masalah manajemen dan koordinasi juga menjadi faktor penghambat dalam pengembangan wisata. Hal tersebut berangkat karena adanya laporan wisatawan mengenai harga jual yang tidak wajar membuat wisatawan enggan datang lagi sehingga menurunkan pendapatan masyarakat Desa Tasikharjo.

Dampak pemberdayaan terlihat signifikan, dengan perubahan mata pencaharian yang dulunya hanya petani garam, nelayan dan petani rajungan sekarang beralih dengan berdagang di tempat wisata yang memberikan pendapatan sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional) Kabupaten Rembang, selain itu

dampak secara sosial dapat dilihat dengan tingkat pendidikan mereka yang menempuh jenjang perguruan tinggi menjadi lebih banyak. Namun secara dampak lingkungan ternyata masih mengalami kendala yang mana mereka masih menerapkan pengelolaan sampah dengan cara dibakar sehingga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan udara.

4.2 Saran

Saran bagi pemerintah Desa Tasikharjo sebagai desa wisata perlu untuk mendorong pengembangan Desa Wisata Tasikharjo lebih lanjut, langkah pertama yang perlu dilakukan yakni dengan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Hingga saat ini, masyarakat masih bergantung pada pendanaan dari pemerintah daerah dan pihak-pihak diluar pemerintah, sehingga mereka hanya menjalankan program yang sudah ada tanpa mampu berinovasi secara mandiri. Upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa yakni mengadakan program pelatihan manajemen keuangan dan kewirausahaan. Dengan keterampilan ini, masyarakat akan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi lokal dengan lebih kreatif, serta dapat mengelola desa wisata secara independen, baik dari sisi keuangan maupun operasional.

Pengembangan infrastruktur di Desa Wisata Tasikharjo juga perlu diarahkan kepada keberlanjutan. Meski beberapa fasilitas dasar telah dibangun, perlu dilakukan perencanaan lebih lanjut untuk memperkuat infrastruktur dengan cara yang ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, seperti

fasilitas pengelolaan sampah yang baik dan penggunaan energi terbarukan, harus menjadi prioritas untuk menjaga kualitas lingkungan desa wisata.

Selanjutnya, perbaikan manajemen dan koordinasi juga sangat diperlukan untuk menjaga kualitas layanan kepada wisatawan. Masalah manajemen yang ada, seperti ketidakjelasan harga yang membuat wisatawan berfikir ulang untuk berkunjung kembali, harus segera diatasi dengan pelatihan manajemen wisata yang lebih terstruktur. Dibutuhkan pelatihan dalam bidang pelayanan pelanggan dan penanganan keluhan wisatawan. Dengan demikian, pengalaman positif pengunjung dapat diperbaiki, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Akhirnya, pengembangan wisata berbasis komunitas dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat lokal dalam inovasi dan pengelolaan kegiatan wisata, seperti paket ekowisata atau wisata budaya, akan memperkuat rasa memiliki terhadap desa wisata. Dengan begitu, potensi lokal tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga memperkuat identitas Desa Tasikharjo sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Rembang. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pengembangan Desa Wisata Tasikharjo akan berjalan lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi kemandirian masyarakat, perekonomian lokal, serta kelestarian lingkungan.